

**EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PENYERAPAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DI KECAMATAN KUALA BATEE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

OLEH:

KIKI PARMAYA
NIM: 1805906010017



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022**

**EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PENYERAPAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DI KECAMATAN KUALA BATEE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

KIKI PARMAYA
NIM: 1805906010017



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU Meulaboh, Aceh Barat Po Box 59. Telp: (0655) 7018513
Website: www.utu.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 05 Desember 2022

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jenjang : Strata 1

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan hasil penelitian saudara:

Nama : **Kiki Parmaya**
Nim : 1805906010017

Dengan judul: **Efektivitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing

Yayuk Eko Wahyuningsih, S.E., M.Si
NI PPPK. 197310202021212004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si
NIP.196002121989031003

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si
NI PPPK. 197411052021211002

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU Meulaboh, Aceh Barat Po Box 59. Telp: (0655) 7018513
Website: www.utu.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 05 Desember 2022

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata 1(S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

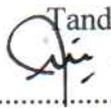
Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Kiki Parmaya**
Nim : 1805906010017

Dengan judul: **Efektivitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.**

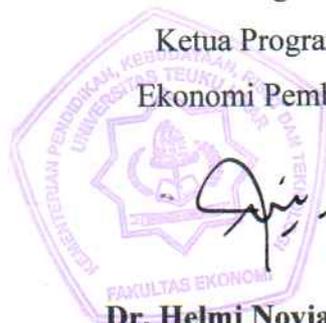
Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 30 November 2022.

Menyetujui
Komisi Ujian

		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si 
Sekretaris	: Yayuk Eko Wahyuningsih, S.E., M.Si 
Anggota	: Rollis Juliansyah, S.E., M.Si 

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si
NI PPPK. 197411052021211002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Parmaya

Nim : 1805906010017

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Meulaboh, 30 November 2022
Saya yang membuat pernyataan



Kiki Parmaya

Nim.1805906010017

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang
maha mulia

Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak
diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS: Al-Mujadilah 11)

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih,
bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah
memberi warna-warni kehidupanku. Ku bersujud dihadapan Mu, Engaku berikan aku
kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku. Segala Puji bagi Mu
ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil' alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih
cita-cita besarku.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan
kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani
setiap rintangan yang ada didepanku.., Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu hingga segalanya.

Maafkan anakmu Ayah, Ibu, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam..seraya tanganku
menadah" .. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku
diantara kedua malikatmu yang setiap waktu ikhlas
menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan
setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat
hawa api nerakamu..

Untukmu Ayah (**MALIKI**),, Ibu (**MAIMUNAH**)

...Terimakasih....

we always loving you... (ttd. Anakmu)

Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

Kepada adek ku yang bernama **Zuli Naimar, Musawir**, dan dan terimakasih juga
kepada kakak dan abang- abang sepupu ku beserta seluruh keluarga ku lainnya tiada
waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian.
walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan.

Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...

Bapak dan Ibu **Yayuk Eko Wahyuningsih, S.E., M.Si** selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak.,

Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi :

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada ku...

Staf Akademik:

Semua staf akademik di Fakultas Ekonomi, terima kasih banyak atas semua bantuan bapak dan ibu selama ini.

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman seangkatan 2018 "Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa", Dan kepada Sahabat saya yang selalu ada dan mendukung saya **Yunalis A.Ma., S.T, Erna Sari, S.E, Meri Yani, S.E, Irida Safitri, S.E, Tia Yuliza S.E, Syarifah Fuada, S.E. Santriani, S.E, Zaitun Monalisa S.E.** Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika saya banyak salah dengan maaf yang tidak terucap. Terima kasih untuk support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan Terima kasih juga untuk kost Srikandi **Ayu Fitria, Lusi Yana Masturi, Winda Arfina, Niswatul Khaira** dan juga buat teman-teman angkatan 2018-2022

Prodi Ekonomi Pembangunan, dan buat teman-teman, adek-adek, seluruh fakultas yang ada di Universitas Teuku Umar.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

Never give up!

Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua, Terimakasih beribu terimakasih ku ucapkan.

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,

Kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi ini kupersembahkan .

"KIKI PARMAYA, S.E"

BIODATA

Nama : Kiki Parmaya
Tempat/Tanggal Lahir : Sikabu, 03 September 1999
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Nama Orang Tua
a. Ayah : Maliki
Ibu : Maimunah
b. Pekerjaan : Petani
Alamat orang Tua : Desa Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendidikan yang telah ditempuh
Tk : Aba Sikabu
Sekolah Dasar : MIN 4 Aceh Barat Daya
SMP (2012 - 2015) : SMP Terpadu Ibnu Sina
SMA (2015 - 2018) : MAS Kuala Batee
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi
Pembangunan Universitas Teuku Umar
Meulaboh, Tahun Masuk 2018

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan ridha-Nya pula telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Efektivitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya*”. Shalawat beiring salam kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membuat reformasi total umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang saya rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis sangat mencintai penulis dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati penulis mempersembahkan untuk Ayah handa Maliki dan Ibu tercinta Maimunah, serta abang-abang dan adik kandung penulis yang telah memberikan segala dukungan, pengorbanan, kasih sayang dan penulis do'a yang tulus untuk kesuksesan penulis.
2. Ibu Yayuk Eko Wahyuningsih, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyusun tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Helmi Noviar, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Bapak Dr. Saiful Badli S.E.,M.Si selaku Sekretaris

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

4. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, SE, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Dr. Ishak Hasan, M. Si Selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Akademik, atas kesempatan penulis menimbangkan ilmu dikampus ini.
7. Teman-teman umumnya angkatan 2018 Prodi Ekonomi Pembangunan, yang selalu setia memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari seluruh pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya

Alue Peunyareng, 16 Mei 2022

KIKI PARMAYA
_NIM. 1805906010017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan pengaruh penyerapan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Memanfaatkan alokasi anggaran dana desa untuk sejumlah program tertentu, di mana dari 100% dana desa yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur berjumlah 70% dimana dalam pembangunan infrastruktur aparatur desa menggunakan dana desa tersebut seperti membangun kantor desa, pembangunan irigasi. Adapun sisanya 30% non Infrastruktur digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu bidang pertanian, dan posyandu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data ini bersumber dari BPS Aceh Barat Daya, Kantor Camat, Kantor Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan anggaran dana desa padang sikabu dalam pembangunan infrastruktur dikategorikan sudah efektif. Sedangkan menurut regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dimana nilai alokasi dana desa yang memiliki nilai t_{hitung} sebesar 52.456, sedangkan nilai t_{tabel} yaitu 2.776. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Parmaya
Nim : 1805906010017
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Efektivitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 5 Desember 2022

Yang menyatakan



Kiki Parmaya

NIM. 1805906010017

ABSTRACT

This study aims to determine how the level of effectiveness and the effect of absorption of village fund allocations in rural infrastructure development in Kuala Batee District, Southwest Aceh Regency. Utilizing village fund budget allocations for a number of certain programs, of which 100% of village funds are used for Infrastructure Development, 70% of which in infrastructure development, village officials use village funds such as building village offices, irrigation development. The remaining 30% non-infrastructure is used for community empowerment, namely agriculture and posyandu. The type of data used in this study is secondary data, where this data is sourced from BPS Aceh Barat Daya, Camat Office, Padang Sikabu Village Office, Kuala Batee District, Southwest Aceh Regency. Based on the results of this study, it shows that based on the Padang Sikabu village fund budget, infrastructure development is categorized as effective. Meanwhile, according to simple linear regression using SPSS assistance, village fund allocation has a significant effect on infrastructure development where the value of village fund allocation has a t-count value of 52,456, while the t-table value is 2,776. Thus, the value of t count > t table with a significant level of $0.000 < 0.05$. If t count > t table, then H_0 is rejected and H_1 is accepted, meaning that there is a significant influence between the allocation of village funds on infrastructure development in the village of Padang Sikabu, Kuala Batee District, Southwest Aceh Regency.

Kata Kunci : Allocation of village fund and Infrastructure development

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
BIODATA	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Efektivitas	7
2.1.1 Pengertian Efektifitas	7
2.1.2 Ukuran Efektifitas	8
2.2 Penyerapan dan Alokasi Dana Desa	9
2.2.1 Pengertian Penyerapan	9
2.2.2 Pengertian dan Alokasi Dana Desa	10
2.2.3 Tujuan dan Peruntukan Dana Desa	11
2.2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	12
2.3 Dana Desa	16
2.3.1 Pengertian Dana Desa	16
2.3.2 Tujuan Dana Desa	18
2.3.3 Penggunaan Dana Desa.....	18
2.3.4 Pemerintah Desa.....	20
2.4 Pembangunan Infrastruktur	22
2.4.1 Pengertian Pembangunan	22

2.4.2	Pengertian Infrastruktur	24
2.5	Penelitian Terdahulu	26
2.6	Kerangka Pemikiran.....	30
2.7	Perumusan Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN 32		
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.2	Data Penelitian	32
3.2.1	Jenis dan Sumber Data	32
3.2.2	Teknik dan Pengumpulan Data	32
3.3	Metode Analisis Data.....	33
3.3.1	Analisis Regresi Linier Sederhana	34
3.3.2	Koefisien Determinasi (r^2).....	34
3.3.3	Uji Signifikansi t (Uji t)	35
3.4	Uji Asumsi Klasik	35
3.4.1	Uji Normalitas	35
3.4.2	Uji Heteroskedastisitas	36
3.5	Definisi Operasional.....	36
3.6	Pengujian Hipotesis	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2	Analisis Efektifitas	39
4.3	Pengujian Statistik.....	41
4.3.1	Analisis Regresi Linier Sederhana	41
4.3.2	Koefisien Korelasi (R) & Koefisien Derterminasi (R^2).....	41
4.3.3	Konstanta & Koefisien Variabel Alokasi Dana Desa.....	42
4.3.4	Uji Parsial (Uji t)	43
4.3.5	Uji Asumsi Klasik	43
4.4	Hasil dan Pembahasan	46
4.4.1	Efektivitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN.....		55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee (Tahun 2016-2021).....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Kriteria Nilai Interpretasi Efektifitas	34
Tabel 4.1 Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee (Tahun 2016-2021).....	40
Tabel 4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	41
Tabel 4.4 Konstanta & Koefisien Variabel Alokasi Dana Desa	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (Uji t)	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran31
Grafik 4.1	Hitstogram44
Grafik 4.2	Noramalitas P-P log Regresion Standardized45
Grafik 4.3	Scantterplot46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Target Dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya..	55
Lampiran 2. Output Hasil SPSS	56
Lampiran 3. Uji t	60
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut.

Desa merupakan bentuk kesatuan dari Negara Republik Indonesia, yang dimana keberadaan desa diakui secara Yuridis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, desa mempunyai peran penting dalam menunjang suatu pembangunan di sebuah Daerah ataupun negara, dimana desa sebagai bagian terkecil dari proses pembangunan nasional.

Pengertian sejarah pedesaan dibedakan menjadi dua. Pertama, sejarah pedesaan merupakan sejarah dalam arti yang seluas-luasnya. Disini dimensi waktu menjadi sangat penting, sebab perubahan ialah sebuah proses dalam waktu. Kedua, sejarah pedesaan adalah sejarah yang sangat khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan di daerah pedesaan perlu diberikan perhatian yang khusus bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sadari pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Seperti pada kondisi diatas tentunya tidak terlepas dari peran pemimpin dalam sebuah desa. Pemimpin atau kepala desa bukan hanya orang nomor 1 di sebuah desa akan tetapi dia juga dijadikan panutan oleh warganya. Pemimpin harus mencerminkan sikap dan moral yang baik bahkan etika. Masyarakat desa kebanyakan mengikuti moral kepala desanya tersebut dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas desa dengan benar dan tepat sasaran. Jadi berjalannya sebuah desa tersebut dilihat dari pemimpinnya, jika pemimpinnya cerdas dalam mengawasi aparat-aparatnya dalam menjalankan tugas desa maka desa akan berkembang dan masyarakatnya juga sejahtera.

Dasar hukum dalam Otonomi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Daerah yang disebut sebagai daerah merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah dengan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan

dan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sekitar dengan menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan desa. Lahirnya Qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh yang di lanjutkan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai dasar pembangunan yang berkesinambungan, baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian “Alokasi Dana Desa (ADD)” berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara.

Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, dimana salah satunya Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Sabil, Manggeng, Tangan-Tangan, Setia, Blang Pidie, Susoh, Jeumpa, Kuala Batee, dan Babahrot. Adapun objek penelitian ini di Kecamatan Kuala Batee dimana memiliki jumlah penduduk sebesar 21.665 jiwa pada tahun 2021, dengan rician laki-laki 10955 dan perempuan 10.710 jiwa. Kecamatan

Kuala Batee terdiri 3 Mukim yaitu Mukim Krung Batee, Mukim Kuta Bahagia, Mukim Sikabu. Mukim Sikabu terdiri dari 6 (enam) desa yaitu Desa Alue Padee, Blang Panyang, Kampung Teungoh, Lhung Gelumpang, Muka Blang dan Padang Sikabu (BPS Aceh Barat Daya, 2021).

Berdasarkan 6 (desa) di Kecamatan tersebut peneliti mengambil desa Padang Sikabu. Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Padang Harapan, Dusun Cempaka dan Dusun Durian. Kepala desa menjalankan operasional desa dibantu perangkat desa untuk menentukan perencanaan alokasi anggaran dana desa untuk sejumlah program tertentu, di mana dari 100% dana desa yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur berjumlah 70% dimana dalam pembangunan infrastruktur aparatur desa menggunakan dana desa tersebut seperti membangun kantor desa, pembangunan irigasi persawahan, memabangun jalan menuju ke kantor desa, menyalurkan air bersih kemasyarakat (PDAM) dan lain sebagainya. Adapun sisanya 30% non infrastruktur digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu bidang pertanian, dan posyandu. Bidang pertanian di berikan subsidi dari desa seperti pemberian bibi padi, pupuk, bibit pohon pinang, dan lain sebagainya. Sedangkan posyandu yang diadakan oleh desa dalam 1 bulan 2 kali, satu kali diadakan untuk anak – anak dan bumil, sedangkan satu kalinya diadakan untuk lansia. Berikut data sekunder yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.1 Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee (Tahun 2016 – 2021)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
1.	2016	1.199.123.087,00	1.199.123.087,00	100,00
2.	2017	700.757.179,00	692.403.000,00	98,80
3.	2018	1.120.572.322,78	948.597.840,00	84,65
4.	2019	1.241.115.339,45	1.114.223.800,00	92,19
5.	2020	1.188.392.509,48	1.252.117.850,00	105,36
6.	2021	1.458.427.363,80	1.432.445.760,00	98,21

Sumber: Kantor Desa Padang sikabu kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya (Mei 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Realisasi Anggaran Dana Desa Padang Sikabu yang tertinggi pada tahun 2020 berjumlah 105,36 %, dan yang terendah pada tahun 2018 dengan jumlah persentase sebesar 84,65 %. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi tersebut tidak seimbang dikarenakan dana yang di salurkan oleh pemerintah ke desa setiap tahunnya berbeda-beda.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa efektifitas alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan. Karena dengan berkembangnya suatu desa itu disebabkan oleh pengelolaan dana desa yang lebih efisien. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini maka sebuah desa bisa dikatakan desa yang maju.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul ***"Efektifitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya"***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektifitas dan pengaruh penyerapan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas dan pengaruh penyerapan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru tentang seberapa efektif penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi semua yang membaca, serta bagi peneliti yang berminat untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut lagi dengan menambahkan beberapa variabel agar memperoleh penelitian yang berbeda dengan lainnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan informasi dan arahan yang baik untuk kedepannya bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terutama dalam mengelola berbagai sumber-sumber penerimaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dalam pemanfaatan penggunaan alokasi dana desa agar lebih efektif untuk kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka bab ini membahas mengenai tentang landasan teori sebagai salah dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

Bab ketiga, bagian ini terdiri dari metode penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, model analisis data, dan definisi operasional.

Bab keempat, hasil dan pembahasan yang didalamnya dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian, analisis efektifitas, dan pengujian statistik.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi yang didalamnya menjelaskan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Rivanto dalam Masruri, (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh, (2010), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar. 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.

3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Penyerapan dan Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Penyerapan

Menurut Nugroho, (2013) kemampuan suatu satuan Surat Ketetapan Pajak dan Daerah (SKPD) dalam merealisasikan atau menyerap anggaran yang telah ditetapkan dapat dianggap memenuhi kualifikasi baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan aktual fisik pekerjaan yang diselesaikan, dengan asumsi bahwa fisik actual pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

Namun demikian, fenomena yang terjadi di lapangan adalah penyerapan anggaran baru akan mengalami peningkatan drastis menjelang akhir tahun pelaksanaan anggaran. Hal tersebut menggambarkan terjadinya ketidakefektifan dalam penyusunan perencanaan anggaran terhadap pelaksanaannya. Sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat penyerapan anggaran perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Hal tersebut dikarenakan penyerapan anggaran yang rendah secara tidak langsung menunjukkan ketidakcermatan pemerintah daerah dalam hal ini satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sehingga menimbulkan uang daerah yang menganggur (*idle money*) yang seharusnya dapat dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif (Pamungkas, W. (2022).

2.2.2 Pengertian Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang desa pun yaitu semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan presentase bagi hasil, yaitu bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa.

Eko dan Rozaki, (2005) mengatakan bahwa sesungguhnya kebijakan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode ADD ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Melalui ADD diharapkan desa mendapat “barokah” dari desentralisasi, yaitu memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan desa, membelanjakan, mengelola, dan mengawasinya. Keleluasaan yang diperolehnya ini diharapkan pula akan mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan menstimulasi tercapainya kesejahteraan rakyat desa.

Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

2.2.4 Tujuan dan Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang – undang No.32 Tahun 2004 Surat Edaran Kementrian (Mendagri) No. 140/640/S tertanggal 22 Maret (2005) Pengelolaan ADD dilaksanakan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat, baik dari segi fisik maupun non fisik. Berikut dijelaskan tujuan Alokasi Dana Desa Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa) yang terdiri dari:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Anggaran ADD yang digunakan untuk pengadaan pemerintah desa lebih ditekankan pada tunjangan kurang penghasilan, biaya operasional pemerintah desa, premi asuransi kepala desa dan sekretaris desa, biaya operasional pelaksanaan tugas Baperdes, biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa (LPKMD), biaya peningkatan sumber daya manusia bagi aparat pemerintahan desa, Baperdes, dan LPKMD, dan lain-lain yang dipandang sangat perlu dan mendesak.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 3 yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan lingkungan ditujukan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan dapat mendorong percepatan kemajuan desa. Pemberdayaan ekonomi diutamakan untuk menumbuh kembangkan lembaga ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemberdayaan manusia ditujukan untuk mendukung peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial.

2.2.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Menurut Sari, N. (2018) Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sosialisasi pengelolaan ADD diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa serta dusun.

2. Tahap Perencanaan

- a. Kegiatan perencanaan bersrtujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa;
- b. Penyusunan DRK desa diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes) selanjutnya disahkan oleh kepala desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. DRK ADD beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan/dilaporkan kepada camat untuk diteliti, selanjutnya secara komulatif disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan untuk diproses pencairan dan penyalurannya melalui PT. Bank Jatim Cabang Lamongan kepada rekening bendahara masing-masing desa;

- d. Penyaluran dan pencairan dana ADD diatur melalui penerbitan surat perintah pencairan dana oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan ADD harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana tersebut dalam DRK.
- b. Pelaksana kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna atau Organisasi Pemuda/Remaja, Pokjana Posyandu tingkat desa dan penyelenggara pemerintahan desa serta kepala dusun sesuai dengan kegiatan masing-masing yang tercantum dalam DRK.
- c. Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Pemerintah desa beserta lembaga kemasyarakatan desa lainnya mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan desa dan pembangunan dusun yang besarnya ditetapkan minimal 10% dari dana kegiatan fisik.
- e. Pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan.

4. Tahap Pemantauan

- a. Agar pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan DRK, maka perlu dilaksanakan pemantauan.
- b. Lingkup pemantauan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik kuantitas maupun kualitas.

c. Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh tim Pembina kabupaten, tim pengendali kecamatan dan tim pelaksana desa sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing

5. Tahap Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk keberhasilan ADD yang meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

a. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan ADD ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan permasalahannya, menyangkut perkembangan fisik dan pendanaannya. Pelaporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme dilakukan secara berjenjang melalui tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten.

b. Evaluasi

Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan ADD sesuai tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif, akan dilakukan oleh tim pembina kabupaten dan tim pengendali kecamatan.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2014).

Pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah penganggaran. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan merupakan alat ukur pencapaian dari belanja yang telah dianggarkan tahun lalu. Sedangkan untuk alat pengendalian merupakan sejumlah dana yang sudah disetujui oleh legeslatif. Salah satu indikator untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah desa adalah penyerapan anggaran yang telah dianggarkan tahun lalu, dan bagaimana pembelanjaan yang itu dilakukan (Widodo et al., 2017).

Dana desa adalah salah satu program baru dari pemerintah yang mendukung untuk sebuah kegiatan pembangunan daerah. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang tahun 2014 nomor 6 yang mengatur tentang dana desa, isi

dari undang-undang dana desa tersebut adalah untuk penggunaan dana desa yang diharapkan mampu mewujudkan sebuah desa yang mandiri.

Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Adapun dari Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa yaitu:

- 1) Menentukan Program dan Kegiatan Bagi Penyelenggara Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
- 2) Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- 3) Sebagai Acuan Bagi Pemerintah dalam Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa.

Sedangkan Prinsip penggunaan Dana Desa yaitu: a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. b) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. c) Tipologi desa, dengan mempertimbangan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.3.2. Tujuan Dana Desa

Menurut Muliyanim, (2017) dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan.

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.3.3. Penggunaan Dana Desa

Menurut Hidayati, (2016) berpendapat, dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa agar tujuan dana desa dapat tercapai semaksimal mungkin untuk masyarakat desa seperti:

- a. Bidang Pembangunan Desa Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- (i) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - (ii) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 - (iii) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 - (iv) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
 - (v) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:
- (i) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - (ii) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - (iii) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.

2.3.4 Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2011) Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai Lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
13. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
14. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
15. kolusi, korupsi dan nepotisme.

Sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tercantum dalam pasal 48. Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa
- b. Pelaksana kewilayahan dan
- c. Pelaksana teknis

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsi dengan camat atas nama Bupati /Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

2.4 Pembangunan Infrastruktur

2.4.1 Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan

kemampuan Nasional, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang sehingga akan saling mengisi, saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan Pancasila

Sementara itu, keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang berlangsung terus menerus di Indonesia, pembangunan desa di seluruh wilayah nusantara berorientasi pada hasil yaitu menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam merealisasikan pembangunan nasional yang pada tahun 2017 bertitik fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia,

pemerintah dalam hal ini melakukan estafet pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, berkaitan dengan penelitian ini konsep program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP), dapat dirasakan masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang terlaksana dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang mengarah pada suatu yang lebih baik. Alexander mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti: politik, ekonomi, infrastruktur pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

2.4.2 Pengertian Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi public yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan (Fitriyah, 2017).

Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika pembangunan infrastruktur mendapat perhatian pemerintah.

Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan transformasi informasi dan kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerintahan pedesaan, antar pemerintahan Kecamatan bahkan kemudahan akses menuju bukota Kabupaten.

Mencermati betapa pentingnya infrastruktur dalam kehidupan masyarakat, disamping untuk meningkatkan akselerasi pembangunan maka cukup beralasan jika setiap wilayah dibangunnya infrastruktur yang memadai. Tentunya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi pemerintahan, baik lembaga pemerintah pada level yang paling bawah hingga lembaga pemerintah paling atas (Fitriyah, 2017)

Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Infrastruktur yang dibutuhkan Negara maju tentunya berbeda dengan yang dibutuhkan oleh Negara berkembang bahkan terbelakang. Hal yang sama juga untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, atau daerah industri dengan wilayah pertanian dan pesisir atau kepulauan.

Kurangnya infrastruktur menyebabkan banyak masyarakat hidup terkurung di wilayah terisolasi dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah. Berbagai persoalan mendera kehidupan masyarakat mulai dari kemiskinan, wabah penyakit, gizi buruk, dan keterbelakangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Irmansyah et al.,(2021)	Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur	Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa hingga 1 (satu milyar). Dalam penggunaannya, 30% dari Dana Desa digunakan untuk operasional sedangkan sisanya 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri.
2.	Poluan et al., (2021)	Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)	Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan data dokumen.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah tercapai pada aspek pemahaman program, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, akan tetapi belum efektif dalam hal ketepatan waktu.
3.	Inria Christy Susanto et al (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi di Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)	Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan khususnya yang ada di Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut: 1. Ketepatan penggunaan anggaran yang ada di Desa Baturapa Kecamatan Lolak

				<p>Kabupaten Bolaang Mongondow didasarkan pada prioritas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana pendukung perekonomian masyarakat dalam peningkatan ekonomi warga masyarakat di desa serta percepatan angkutan hasil pertanian.</p> <p>2. Ketepatan dalam penggunaan sumber daya manusia dalam pembangunan infrastruktur didesa dalam pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja dari penduduk desa, melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, adanya pembagian kerja yang jelas serta pengawasan sehingga terselenggaranya pembangunan di desa secara efisien.</p> <p>3. Penetapan penggunaan waktu kerja sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah di susun sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga sesuai dengan proposal kegiatan penggunaan dana desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan tetapi karena memulai pekerjaan yang sering terlambat sehingga dalam pelaksanaan sering terganggu.</p>
4.	Sassi Maimunah et al (2021)	Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Kedok	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Dalam hal ini yang dirasakan oleh pendamping ialah Pemerintah dalam memberikan aturan adanya pendampingan dinilai kurang efektif dikarenakan pendamping lokal desa dalam

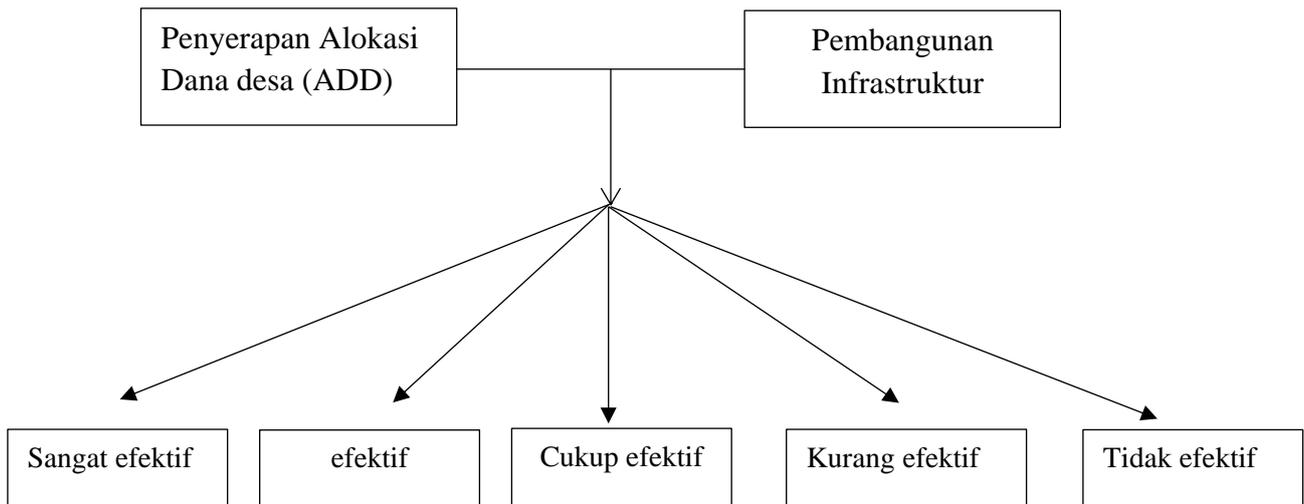
		Kecamatan Turen Kecamatan Malang)		nyatanya 1 orang pendamping mendampingi 3 sampai 4 desa. Sehingga membuat kinerja pendamping tersebut kurang maksimal karena fokus pendamping terpecah oleh desa-desa lain yang mereka damping.
5.	Menurut Siti Khumayah (2021)	Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif.	. Berbicara keefektifan penggunaannya pun sudah sangat efektif dengan ditunjukkan oleh tepat sasaran dari pengalokasian dana seperti melebarkan jembatan dan sebagainya yang berguna untuk membuka akses pemasaran dan distribusi perdagangan yang menjadi tumpuan mata pencaharian desa setempat sehingga pembangunannya pun meningkat.
6.	Teki Pangaloe (2020)	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.	Dari hasil uji efektivitas terhadap Dana Desa khususnya desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang Timur desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu kecamatan Gemeh, menunjukkan tingkat efektivitas diatas 100%. Hal ini berarti bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah di kecamatan Gemeh berjalan secara sangat efektif.
7.	Putri Nadira et al (2019)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa dapat

				dikatakan efektif bagi masyarakat desa apabila dilihat dari hasil pembangunan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat desa.
8.	Giffried R. Rumpia et al (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara)	Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Bulude jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran dan untuk indicator yang kedua yaitu integrasi, dan untuk indikator kedua yaitu sudah dikategorikan baik karena untuk masing-masing indikator sudah mencapai keberhasilan dan keefektivan program tersebut.
9.	Yuli Sri Agustiani et al (2018)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastuktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang	Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian kepala desa cukup memenuhi perannya sebagai kepala desa tetapi partisipasi masyarakat yang ada di Desa Cihambulu masih belum terlaksana dengan efektif masih ada masyarakat yang acuh terjadap pembangunan infrastuktur desa beberapa masyarakat beranggapan bahwa pembangunan infrastuktur desa itu urusan pemerintah setempat, sebagian masyarakat lebih mengurus pekerjaannya dibandingkan mengikuti aktifitas yang membutuhkan keterlibatan masyrakat itu sendiri.
10.	Abdika Jaya et al (2016)	Efektivitas Anggaran Partisipatif dalam Pembangunan	Metode Pengumpulan Data menggunakan	Sehubungan dengan hasil tanggapan responden yang menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif

		Infrastruktur Desa di Kabupaten Musi Rawas	Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi.	pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas masuk dalam kualifikasi cukup efektif, artinya belum masuk dalam kualifikasi efektif, maka dilakukan wawancara kepada beberapa informan untuk memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hasil tanggapan responden tersebut. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif cukup efektif dalam memberikan dampak terhadap pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur desa.
11.	Azlina (2017)	<i>Effectiveness Of Village Fund Management (Case Study Of Village In The Riau Coastal Area).</i>	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa oleh pemerintah ke desa-desa telah dikelola oleh hampir semua warga desa yang belum digunakan oleh pembangunan desa. Sementara dalam distribusi desa masih sering terlambat itu karena keterbatasan sumber daya manusia, semua kegiatan yang di danai oleh desa dalam bentuk laporan dana realisasi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Keterkaitan antara variabel dalam penggunaan alokasi dana desa harus dilakukan dengan efektif mungkin, tingkat keefektifannya dapat diukur dengan membandingkan antara hasil realisasi anggaran dengan target anggaran, apakah efektif atau tidak mengoptimalkan dan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini membuah sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

Adapun dari hasil observasi atau pengamatan langsung pada desa padang sikabu sudah berjalan dengan baik, penyerapan dana desa dalam desa ini sangat baik dilihat dari meningkatnya dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan desa ini pembangunan infrastruktur sudah memadai atau terus berkembang.

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan Pustaka, dan penelitian terdahulu di atas, maka perumusan hipotesis penelitian ini adalah diduga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi pembangunan infrastruktur pedesaan dan penyerapan alokasi dana desa di Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, dimana data ini bersumber dari Kantor Camat, dan Kantor Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap harus menggunakan metode dan sistematika yang tepat. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. *Field Research* (Riset Lapangan)

- a. Wawancara

Wawancara ialah menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan aparatur

desa dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data yang dimaksud yaitu untuk mengamati bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh penelitian dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen peraturan, foto-foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

2. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literature lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku-buku literature dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori.

3.3 Model Analisis Data

Menurut halim (2016), efektifitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya atau target output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja semakin besar output terhadap tujuan maka semakin efektif lah satu unit tersebut dengan demikian untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keungan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Target Alokasi Dana Desa}} \times 100$$

Standar efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memnuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Interpretasi Efektifitas

No	Persentase (%)	Kriteria
1	≥ 100 %	Sangat Efektif
2	90 - 100 %	Efektif
3	80 - 90 %	Cukup Efektif
4	60 - 80 %	Kurang Efektif
5	< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2016)

3.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Ghozali (2018), analisis Regresi Linier Sederhana digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi sederhana, analisis korelasi uji Koefisien Determinasi (r^2), uji T dan uji F yang akan diolah dengan menggunakan program komputer statistik SPSS dengan penjelasan berikut ini:

$$Y = a + bX + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Pembangunan Infrastruktur
- X = Alokasi Dana Desa
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Faktor penganggu

3.3.2 Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien Determinasi atau koefisien penentu menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik atau turunnya (variasi) nilai variabel lainnya (variabel Y) $KD = (r)^2 \times 100\%$ (Siregar, 2015).

3.3.3 Uji Signifikansi t (Uji t)

Menurut Hasan (2008) uji t digunakan untuk menguji hipotesis suatu parameter bila sampel berukuran kecil ($n \leq 30$) dengan ragam populasi tidak diketahui.

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \dots\dots\dots$$

Dimana:

n = Jumlah tahun

r = Koefisien kolerasi

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menyatakan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016).

Uji yang digunakan untuk uji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnoff (Ghozali, 2016), yaitu:

H0: Residual berdistribusi normal

H1: Residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi pada uji ini lebih besar dari 5 persen, maka terima H0 dan residual berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

3.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghazali (2015) Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (X) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, dimana penyaluran dana ini untuk mendukung kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan satuan Rupiah pada tahun 2016 - 2021.
- b. Pembangunan infrastuktur (Y) merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan satuan Rupiah pada tahun 2016 - 2021.

3.6 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial digunakan “Uji t” dengan kriteria sebagai berikut:

- a. $H_0: \beta = 0$, variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat Daya (Y).
- b. $H_1: \beta \neq 0$, variabel independen (X) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat Daya (Y).

Untuk hasil kesimpulan t_{hitung} dalam mengambil keputusan jika:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak maka H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan, antara penyerapan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima maka H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara penyerapan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak di bagian Barat Selatan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 3°34'24"-4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57" – 97°09'19" Bujur Timur dengan ibukota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat Daya di bagi menjadi 9 Kecamatan, dan 152 desa atau gampong. batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut: (BPS Aceh Barat Daya)

- Sebelah Utara: Kabupaten Gayo Lues.
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia.
- Sebelah Barat: Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Selatan.

Luas Kabupaten Aceh Barat Daya 1.882,05 Km² dengan hutan mempunyai lahan terluas yaitu mencapai 129.219,10 ha, di ikuti lahan perkebunan seluas 27.504,28 ha. Sedangkan lahan Bandar Udara Kuala Batu mempunyai lahan terkecil yaitu 42,95 ha.

Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi menjadi 9 Kecamatan, 20 Pemukiman dan 152 Desa, yang terdiri dari 132 Desa definitif dan 20 Desa persiapan. Menurut hitungan GIS (Geographics Information System) luas Kabupaten Aceh Barat Daya mencakup 1.882,05 Km² atau 188.205,05 Ha. Kecamatan Blang Pidie sebagai Kota Aceh Barat Daya memiliki luas 581,22 Km², kemudian disusul oleh Kecamatan Babahrot dengan luas 528,28 Km². Sedangkan Kecamatan yang tidak

begitu luas adalah Kecamatan Susoh dengan luas 19,05 Km² atau sekitar 1,01% dari luas total Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan kuala batee menempati luas wilayah sekitar 176.99 km dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari taman nasional gunung leuser. Kecamatan kuala batee adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Ibu kota pasar kota bahagia dan terdidri dari 21 desa atau gampong.

Desa Padang Sikabu merupakan salah satu desa gampong yang ada di Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Saat ini desa padang sikabu di pimpim oleh Keuchik M. Ali, desa padang sikabu ini memiliki 3 dusun yaitu dusun cempaka, dusun padang harapan dan dusun durian. Jumlah penduduk di desa ini yaitu 1.337 jiwa, laki – laki berjumlah 673 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 664 jiwa dan terdiri dari 428 Kartu Keluarga (Kantor desa padang sikabu, 2022).

4.2 Analisis Efektifitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Rumus untuk mencari hasil dari persen yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Target Alokasi Dana Desa}} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Padang Sikabu
Kecamatan Kuala Batee(Tahun 2016 – 2021)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
1.	2016	1.199.123.087,00	1.199.123.087,00	100,00	Sangat efektif
2.	2017	700.757.179,00	692.403.000,00	98,80	Efektif
3.	2018	1.120.572.332,78	948.597.840,00	84,65	Cukup efektif
4.	2019	1.241.115.339,45	1.114.223.800,00	92,19	Efektif
5.	2020	1.188.392.509,48	1.252.117.850,00	105,36	Sangat efektif
6.	2021	1.458.427.363,80	1.432.445.760,00	98,21	Efektif
Rata-rata		1.151.397.968,6	920.781.256,17	96,535	

Sumber: Kantor Desa Padang sikabu kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya (Mei 2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas maka dapat disimpulkan kriteria rasio efektivitas, penyerapan alokasi dana desa di desa Padang Sikabu dari tahun 2016 – 2021 pada umumnya sudah termasuk dalam katagori sudah efektif, karena rata – rata tingkat efektivitasnya diatas adalah 96,535 persen. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Adapun sisa anggaran dari realisasi setelah digunakan untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya digunakan untuk kegiatan non infrastruktur seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat. Misalnya bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu tunjangan keuchik, tunjangan aparatur desa, dan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa (kantor keuchik). Kemudian pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti dibidang pertanian, di bidang ini aparatur desa memberikan subsidi ke pada masyarakat desa seperti pemberian pupuk, bibit padi dan lain sebagainya. Selanjutnya bidang pembinaan masyarakat mencakup sosialisasi pencegahan narkoba dan sosialisasi kepada masyarakat dibidang

hukum, maksudnya apabila ada peristiwa pada penduduk desa Padang Sikabu, maka aparat desa berhak memberikan sanksi dan denda kepada masyarakat.

4.3 Pengujian Statistik

4.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan alokasi dana desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan alokasi dana desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk melihat besarnya parameter dari masing – masing variabel tersebut, di samping itu juga untuk melihat erat tidaknya hubungan variabel tersebut dan sekaligus untuk mengetahui presentase yang di pengaruhi oleh variabel yang di analisis.

Tabel 4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	alokasi dana desa ^b		. Enter

a. Dependent Variable: pembangunan infrastruktur

b. All requested variables entered.

4.3.2 Koefisien Korelasi (R) & Koefisien Derterminasi (R²)

Tabel 4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.999	.998	30.76822

a. Predictors: (Constant), alokasi dana desa (x)

Sumber: Hasil Regresi (di olah) 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,999 bahwa terdapat hubungan yang kuat, dan hasil uji koefisien determinasi (r²)

menunjukkan bahwa nilai R Square yaitu sebesar 0,999 (99,9%) menunjukkan bahwa variabel dependen pendapatan (Y) dapat dijelaskan oleh seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alokasi dana desa (X). sedangkan sisanya 1,00% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.3 Konstanta & Koefisien Variabel Alokasi Dana Desa

Tabel 4.4 Konstanta & Koefisien Variabel Alokasi Dana Desa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	11.126	34.229	
	alokasi dana desa	.946	.018	.999

a. Dependent Variable: pembangunan infrastruktur

Pada tabel 4.4 hasil perhitungan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 11,126 + 0,946 X$$

Dimana X = alokasi dana desa

Y= pembangunan infrastruktur

a. Konstanta

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh nilai konstanta 11,126 artinya apabila variabel alokasi dana desa dan pendapatan nelayan sama dengan 0 maka nilai konstanta sebesar 11,126.

b. Koefesien variabel alokasi dana desa

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien variabel alokasi dana desa sebesar 0,946 artinya, apabila alokasi dana desa meningkat sebesar Rp 1 maka pembangunan infrastruktur di desa padang sikabu

kecamatan kuala batee kabupaten aceh barat daya mengalami kenaikan sebesar 0,946. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa di desa padang sikabu lebih banyak anggarannya digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur.

4.3.4 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.126	34.229		.325
	alokasi dana desa	.946	.018	.999	52.456

a. Dependent Variable: pembangunan infrastruktur

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji t) pada tabel diatas, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Karena $t_{hitung} = 52,456 > t_{tabel} = 2,776$ dan signifikan yang dihasilkan dari variabel alokasi dana desa (X) yaitu sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

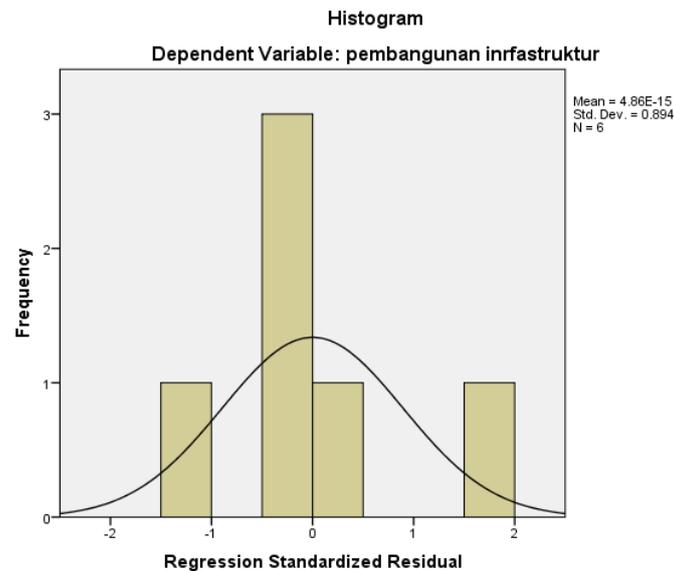
4.3.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas dalam model regresi yaitu dengan melihat garis histogram tidak miring ke kiri ataupun ke kanan dapat dikatakan normal. Sedangkan untuk normalitas probabilitas plot, data dikatakan normal apabila titik-

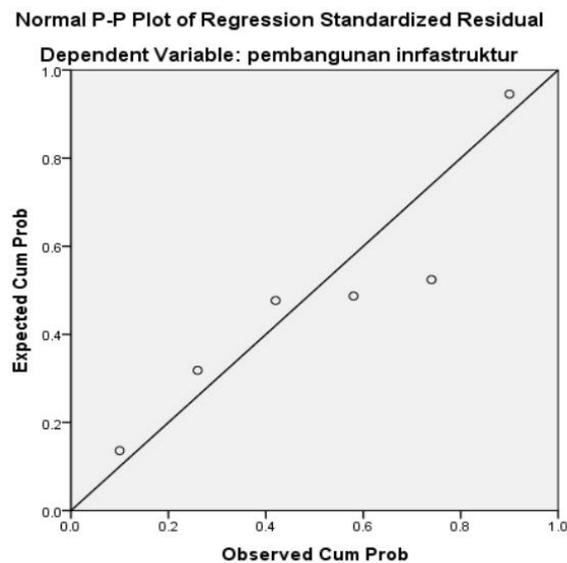
titik data tersebar berada disekitar garis diagonal dan juga penyebarannya mengikuti diagonal.

Untuk melihat gambar grafik histogram dan probabilitas plot dari hasil olahan data aplikasi SPSS yang ada pada halaman dibawah ini:



Grafik 4.1 Hitstogram
Sumber: output SPSS (2022)

Grafik 4.1 di atas, terlihat bahwa titik garis tengah histogram berada di tengah-tengah yaitu berada pada angka nol (0), tidak miring ke kiri dan juga tidak miring ke kanan. Hal ini berarti bahwa uji normalitas dalam penelitian ini bersifat normal.



Grafik 4.2 Normalitas P-P log Regresion Standardized Residual Sumber: Output SPSS (2022)

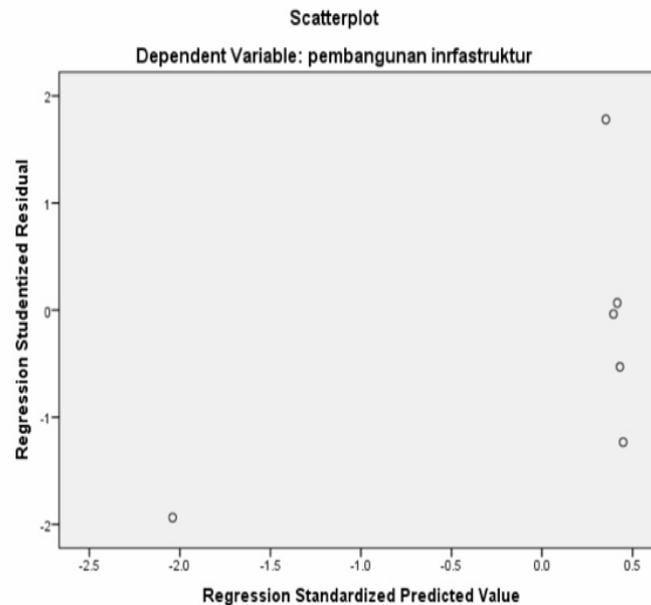
Grafik 4.2 probabilitas plot di atas, terlihat bahwa titik penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan juga penyebarannya mengikuti garis diagonal tersebut. Hal ini berarti bahwa uji normalitas dengan menggunakan probabilitas plot pada penelitian ini didapatkan hasil data yang normal.

b. Uji Heteroskedasitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier sederhana, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik 4.3 Scatterplot
Sumber: Output SPSS (2022)

Grafik 4.3 diatas, terlihat bahwa tingkat penyebaran titik data dalam penelitian ini tersebar secara teratur dan tidak tersebar secara merata, ini berarti bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Hasil dan Pembahasan

4.4.1 Efektivitas dan Pengaruh Penyerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitan di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa anggaran yang diberikan pemerintah digunakan oleh aparatur desa dengan baik. Pembangunan infrastruktur di desa ini sudah berjalan dengan baik dan pembangunan yang dibutuhkan oleh mayarakat sudah memadai, jadi dapat kita simpulkan dapat disimpulkan kriteria rasio

efektivitas, penyerapan alokasi dana desa di Desa Padang Sikabu dari tahun 2016 – 2021 pada umumnya sudah termasuk dalam katagori sudah efektif, karena rata – rata tingkat efektivitasnya diatas 96,535 persen. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat diperoleh nilai alokasi dana desa yang memiliki nilai t_{hitung} sebesar 52,456, sedangkan nilai t_{tabel} yaitu 2,776. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil penelitian ini mendukung sebelumnya yang dilakukan oleh Irmansyah “Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur” Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur disewa Rompu itu bisa dikatakan sudah tepat. Dilihat dari kondisi masyarakat sekarang yang sudah mulai membaik dari segi pendapatan, dikarenakan akses jalan untuk keluar masuk sudah diperbaiki oleh pemerintah desa setempat.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2021) “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat” Hasil dari penelitian ini bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted R Square di peroleh angka 0,131, hal ini menunjukkan bahwa 13,1% variasi dari tinggi rendahnya pengalokasian dana desa sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti. Kemudian berdasarkan dari

hasil Uji t di ketahui bahwa Alokasi dana desa (X) berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y). hal ini di buktikan dengan hasil perhitungan uji t hitung sebesar 52,456, sedangkan pada t tabel adalah 2,36541 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa H_0 di terima. Selain itu juga di peroleh persamaan regresi $Y = 17.528 + 0,342X$.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimawan dan Aryani (2019) “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima”. hasil dari penelitian ini hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar -1,00 (negatif) dengan p-value.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Efektivitas Penyerapan dan Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya” adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tersebut efektif, hal ini bisa di rasakan oleh masyarakat Desa Padang Sikabu.
2. Berdasarkan uji regresi linier sederhana, koefisien korelasi (r) dan koefisien derterminasi (r^2), konstanta dan koefisien variabel alokasi dana desa, uji parsial (uji t). Hal ini diketahui bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan infrastruktur.
3. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka variabel bebas alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan infrastruktur.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan pelatihan kepada aparatur atau perangkat desa untuk dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsinya di dalam bidang pengelolaan alokasi dana desa agar lebih efektif dan efisien.
2. Selanjutnya perlu di tingkatkan lagi dalam perencanaan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa, agar masyarakat desa aktif dalam program pembangunan desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui tentang program alokasi dana desa atau dengan menambahkan variabel bebas seperti anggaran desa, belanja desa, optimalisasi dana desa sehingga hasil yang didapatkan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdika Jaya, Ikit. (2016). Efektivitas Anggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Media Ekonomi* (Jurmek) Vol. 21, No. 3.
- Saibani, A. (2014). *pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Azlina, N., dan Hasan, A. 2017. The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau). *International Journal of Economic Research* Volume 14 Number 12 ISSN: 0972-9380 Page 325 Faculty Economics and Business Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistik, (2022). *Letak Geografis Wilayah Aceh Barat Daya*, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Badan Pusat Statistik, (2021). *Jumlah Penduduk di Kecamatan Kuala Batee*, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Eko, S., dan Rozaki, A. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Ire Press.
- Fitriyah, N., & Margono, A. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 538-550.
- Giffriet R. rumpia, Kiyai, B., dan Kolondam, H. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(74).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*
- Halim, Abdul. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Pokok-Pokok Materi Statistic (2) (Statistic Interfensif)*. Edisi - 2. PT. Bumi Aksara. Jakarta Henri Sirnamora. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Hidayati, Nurul. 2016. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Inria Christy Susanto, Welson Y. Rompas, Novva N. Plangiten. (2021) Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi di Desa Baturapa

Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) *Jurnal Akuntansi dan Pajak* No. 107 Vol. VII 2

Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.

Imam Ghazali. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.

Kantor desa padang sikabu, (2022). *Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Padang Sikabu (Tahun 2016–2021)*. Kecamatan kuala batee, kabupaten aceh barat daya.

Kantor desa padang sikabu, (2022). *Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Kartu Keluarga (Kk) Didesa Padang Sikabu*. Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Masruri. (2014). *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata.

Muasaroh. (2010). *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelsksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang.

Nadia, E. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).

Nugroho, A. S. 2013. *Penerapan Model Pembelajaran Practice Rehearsal Pairs dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA kelas V SDN Kebonduren 02 Ponggok Kabupaten Blitar*. Jakarta: Grasindo.

Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta

Qanun Provinsi Aceh, no 5 tahun 2003 tentang pemerintahan desa.

Pamungkas, W. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 99-109.

Poluan Florence D. J. Lengkong. (2021) Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan) *Jurnal Akuntansi dan Pajak* No. 111 Vol. VII

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan *Pemerintah Dalam Negeri* Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan *Pemerintah Republik Indonesia* Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Nadira, P., Yuliani, R., & Dewi, A. (2019). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di kecamatan karau kuala kabupaten barito selatan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2).

Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.

Sassi Maimunah, Afifuddin, Suyeno (2021). Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik* Vol. 15, No 3.

Siti Khumayah, (2021). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* p-ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246 Vol. 2, No. 1

Siregar, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sari, N. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal Ideal: Journal of Indonesia Development and Economics Analysis*, 14(2).

Indrawati, Sri Mulyani. (2017) *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu

Teki Pangalo, Steeva Y. L. Debby. Ch. Rotinsulu, Tumangkeng. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.20. No. 03

Widodo, M. W., & Ratnanto, S. (2017). Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 2(1), 40-48.

Yuli Sri Agustiani, S., & Solihat, Y. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 187-195.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Online (diakses pada 2 Mei 2015).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kalianda: Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Lampiran 1. Target Dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Padang
Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pembangunan Infrastruktur (Rp)	Pembangunan Non Infrastruktur (Rp)
1.	2016	1.199.123.087,00	1.199.123.087,00	984.413.087,00	214.710.000
2.	2017	700.757.179,00	692.403.000,00	419.421.000,00	272.982.000
3.	2018	1.120.572.332,78	948.597.840,00	344.260.000,00	604.337.840
4.	2019	1.241.115.339,45	1.114.223.800,00	413.351.700,00	700.827.100
5.	2020	1.188.392.509,48	1.252.117.850,00	388.208.350,00	863.909.500
6.	2021	1.458.427.363,80	1.432.445.760,00	364.182.000,00	1.068.263.760

Lampiran 2. Output Hasil SPSS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pembangunan infastruktur	1681.3333	722.31120	6
alokasi dana desa	1766.0000	763.18386	6

Correlations

		pembangunan infastruktur	alokasi dana desa
Pearson Correlation	pembangunan infastruktur	1.000	.999
	alokasi dana desa	.999	1.000
Sig. (1-tailed)	pembangunan infastruktur	.	.000
	alokasi dana desa	.000	.
N	pembangunan infastruktur	6	6
	alokasi dana desa	6	6

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	alokasi dana desa ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: pembangunan infastruktur

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.999	.998	30.76822	1.526

a. Predictors: (Constant), alokasi dana desa

b. Dependent Variable: pembangunan infastruktur

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2604880.600	1	2604880.600	2751.586	.000 ^b
	Residual	3786.733	4	946.683		
	Total	2608667.333	5			

a. Dependent Variable: pembangunan infastruktur

b. Predictors: (Constant), alokasi dana desa

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.126	34.229		.325	.761		
	alokasi dana desa	.946	.018	.999	52.456	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: pembangunan infrastruktur

Collinearity Diagnostics^a

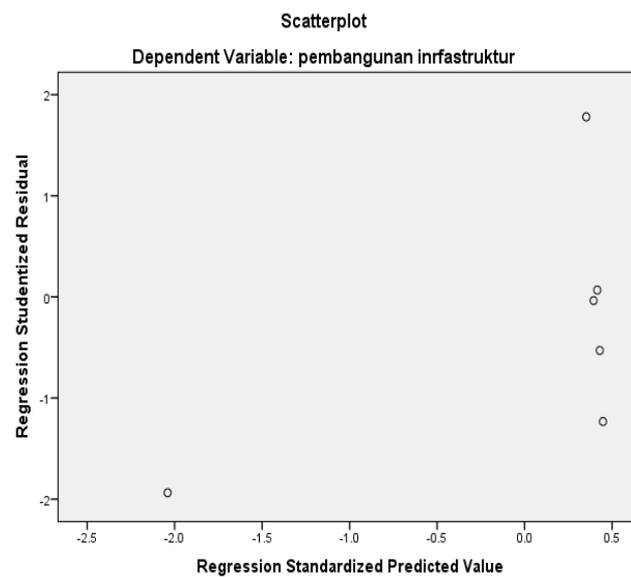
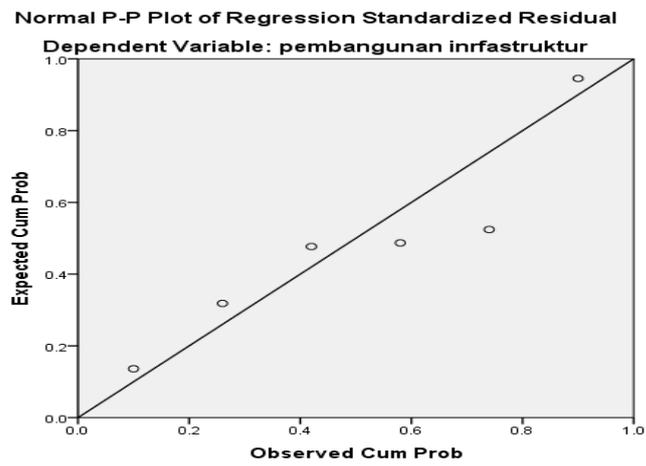
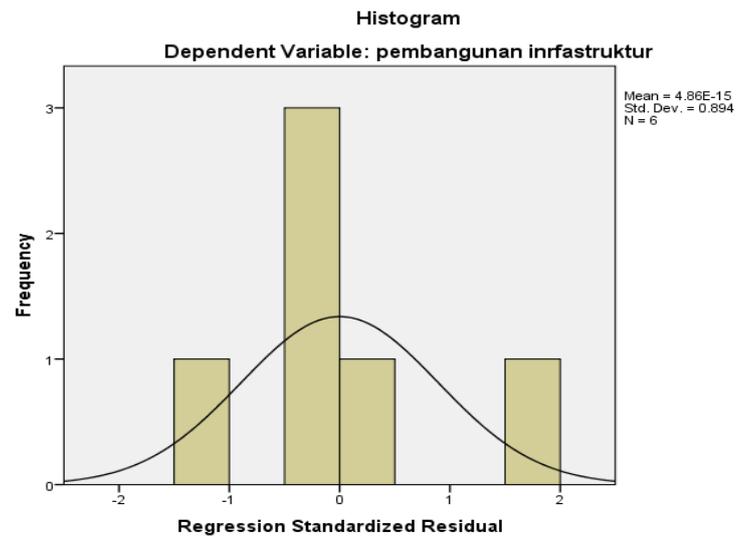
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	alokasi dana desa
1	1	1.930	1.000	.03	.03
	2	.070	5.260	.97	.97

a. Dependent Variable: pembangunan infrastruktur

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	208.7891	2004.7823	1681.3333	721.78676	6
Std. Predicted Value	-2.040	.448	.000	1.000	6
Standard Error of Predicted Value	13.465	30.754	16.597	6.938	6
Adjusted Predicted Value	1924.0739	2192.3962	2012.0409	93.41392	6
Residual	-33.78235	49.25793	.00000	27.51993	6
Std. Residual	-1.098	1.601	.000	.894	6
Stud. Residual	-1.937	1.780	-.315	1.276	6
Deleted Residual	-1985.39612	60.92613	-330.70752	811.35191	6
Stud. Deleted Residual	-6.739	3.385	-.860	3.302	6
Mahal. Distance	.124	4.162	.833	1.631	6
Cook's Distance	.000	2080.023	346.772	849.116	6
Centered Leverage Value	.025	.832	.167	.326	6

a. Dependent Variable: pembangunan infrastruktur



Lampiran 3. Uji t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi di Kantor BPS Aceh Barat Daya



**Dokumentasi di Kantor Camat Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya**



**Dokumentasi di Kantor Desa Padang Sikabu Kecamatan
Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya**



Infrastruktur Jalan di Desa Padang Sikabu



**Infrastruktur Irigasi Perairan Sawah
di Desa Padang Sikabu**



**Infrastruktur Tanggul Perairan Sawah
di Desa Padang Sikabu**



**Infrastruktur Perairan Air Bersih (PDAM)
di Desa Padang Sikabu**



Infrastruktur Jalan Sitapak Dusun Cempaka di Desa Padang Sikabu



Infrastruktur Jalan Sitapak Dusun Padang Harapan di Desa Padang Sikabu